



REFERENDUM KEMERDEKAAN CATALUNYA DARI SPANYOL

Humphrey Wangke*)

Abstrak

Spanyol kini sedang menjadi sorotan dunia internasional karena terancam perpecahan akibat Catalunya, sebuah wilayah otonom di timur laut Spanyol, ingin merdeka dan melepaskan diri dari negara Spanyol. Untuk merealisasikan keinginannya itu, pemerintah otonom dan masyarakat Catalunya mengadakan referendum kemerdekaan pada tanggal 1 Oktober 2017. Hasil referendum menunjukkan 90% dari 2,25 juta pemilih memutuskan untuk merdeka dan melepaskan diri dari Madrid. Namun, Pemerintah Spanyol menganggap referendum tersebut ilegal dan menolak mengakuinya. Kasus Catalunya dapat menjadi pelajaran baru negara-negara lain, termasuk Indonesia.

Pendahuluan

Referendum pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2017 merupakan babak baru dari kebuntuan proses politik antara Pemerintah Spanyol dan wilayah otonom Catalunya selama bertahun-tahun. Otoritas Catalunya sudah lama menginginkan kemerdekaan karena beranggapan Pemerintah Spanyol berlaku tidak adil dengan mengeruk kekayaan Catalunya serta menolak hak menentukan nasib (*self-determination*). Pemerintah Spanyol dengan dukungan pengadilan Spanyol mengumumkan bahwa referendum kemerdekaan Catalunya adalah ilegal dan inkonstitusional. Pihak berwenang Spanyol menyatakan pemerintah separatis

Catalunya telah mendorong pemilih untuk melanggar hukum.

Referendum kemerdekaan sudah direncanakan sejak bulan Juni 2017 dan disetujui parlemen Catalunya pada 6 September 2017. Karena keputusan parlemen ini, Pemimpin Catalunya Carles Puigdemont bersikeras bahwa pengadilan maupun pemerintah pusat tidak dapat menunda keputusan pemerintahan Catalunya untuk memerdekakan diri. Pemerintah Spanyol di bawah pimpinan Perdana Menteri Mariano Rajoy mengkritik referendum Catalunya sebagai tindakan melanggar hukum dan mendesak Mahkamah Konstitusi menunda

*) Peneliti Utama Masalah-Masalah Hubungan Internasional pada Bidang Hubungan Internasional, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. *Email*: humphrey.wangke@dpr.go.id



keputusan yang telah disahkan Parlemen Catalunya. Tulisan ini akan mengkaji secara singkat, alasan Catalunya memilih untuk merdeka, sistem pemerintahan dan politik penyeragaman identitas di Spanyol yang melatarbelakanginya, serta pelajaran yang bisa diambil dari kasus yang terjadi di salah satu wilayah otonom di Spanyol tersebut.

Alasan Minta Merdeka

Wilayah Otonom Catalunya menuntut merdeka karena dua alasan penting yaitu, *pertama*, krisis ekonomi 2008 telah mendorong kenaikan angka pengangguran dan hutang di Spanyol, tidak terkecuali di Catalunya. Berdasarkan data pemerintah dari 2005 hingga 2016, ditemukan korelasi yang tinggi antara dukungan kemerdekaan dengan pengangguran di Catalunya. Masyarakat Catalunya percaya bahwa Madrid punya andil besar dalam krisis tersebut. Asumsi ini diperkuat lagi dengan permintaan Madrid kepada Catalunya untuk membayar pajak lebih tinggi dibanding wilayah lain guna memperkuat perekonomian wilayah miskin di Spanyol.

Catalunya membayar pajak senilai US\$12 miliar per tahun kepada Madrid. Nyatanya, dari jumlah pajak yang disetorkan ke Madrid tidak mempengaruhi besarnya imbalan yang diperoleh Catalunya. Ketika isu pajak, krisis finansial, pengangguran, hingga rasa terabaikan dialami, Catalunya menghidupkan kembali gejolak separatis. Pada 2012, wacana referendum untuk memerdekakan diri mendapat dukungan luas.

Alasan *kedua*, keputusan Pemerintah Madrid untuk membatalkan pemberlakuan Undang-Undang Peradilan Konstitusi 2010, padahal undang-undang tersebut bertujuan untuk meningkatkan Statuta Otonomi Catalunya agar setara dengan konstitusi. Kedua alasan di atas telah meyakinkan masyarakat Catalunya bahwa kehidupan mereka akan menjadi lebih baik apabila berada di bawah kendali pemerintahan sendiri.

Selain dua faktor tersebut, tuntutan referendum juga didasari politik identitas yang kuat. Budaya, tradisi, hingga bahasa Catalunya telah memberikan identifikasi ataupun karakter yang melekat pada setiap masyarakat Catalunya. Sejak saat itu pula Madrid menentang keras referendum dengan alasan bahwa tindakan tersebut

melanggar konstitusi 1978, yang salah satu pasalnya berbunyi “setiap wilayah merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Bangsa Spanyol”.

Sistem Pemerintahan Spanyol

Spanyol adalah sebuah monarki konstitusional dengan sistem pemerintahan berbentuk monarki parlementer. Dalam monarki parlementer kekuasaan eksekutif dilakukan oleh kabinet (perdana menteri) dan bertanggung jawab kepada parlemen. Raja hanya sebagai simbol pemersatu yang kedudukannya tidak dapat diganggu gugat.

Di bawah konstitusi 1978, majelis nasional (Cortes) terdiri atas Kongres Deputi dan Senat. Keduanya dipilih untuk masa jabatan 4 tahun. Raja menunjuk presiden pemerintah, atau perdana menteri, yang mengepalai Dewan Menteri. Perdana menteri dipilih dari partai politik yang memenangkan kursi terbanyak dalam Cortes. Meski pada umumnya rakyat Spanyol menerima sistem monarki parlementer, namun terdapat sekelompok generasi muda Spanyol yang menolaknya dengan alasan tiap orang lahir dengan hak dan kewajiban yang sama.

Sistem otonomi Spanyol membagi Spanyol ke dalam komunitas otonom yang memiliki kekuasaan di bidang fiskal dan legislatif. Setiap komunitas otonom memiliki dewan perwakilan daerahnya sendiri dan otonomi budaya seperti hak untuk menggunakan bahasanya sendiri. Spanyol dibagi dalam 17 komunitas otonom setingkat provinsi yang terdiri dari 50 kota dan 2 kota otonom berdasarkan wilayah historis di negara itu.

Meski bukan negara federal tetapi Spanyol mempunyai struktur federal dengan Catalunya sebagai salah satu wilayah otonomi dengan luas wilayah 32.114 km² yang terdiri dari empat provinsi yaitu Barcelona, Girona, Lleida, dan Tarragona. Bahasa resmi warga adalah Catalan, Spanyol, dan Aranese. Selain memiliki budaya dan bahasa yang berbeda, Catalunya menyumbang seperlima ekonomi Spanyol. Atas dasar itulah Pemerintah Catalunya mengadakan referendum kemerdekaan dari Spanyol.

Pemilihan legislatif lokal yang akan mengesahkan seorang kepala daerah merupakan ekspresi pelaksanaan otonomi daerah. Selain otonomi fiskal yang semakin

besar, kekuasaan legislatif lokal juga mencakup penetapan berbagai kebijakan, baik bagi komunitas maupun kota otonomnya. Sistem ini justru dimanfaatkan untuk memperoleh kemerdekaan seperti yang sering dilakukan oleh Provinsi Catalunya dan Basque.

Sayangnya, gerakan menuju merdeka seratus persen di Catalunya dan Basque serta wilayah otonom lain di Spanyol selalu tidak didukung penuh rakyatnya sendiri. Masih banyak yang tetap memilih bersama Kerajaan Spanyol. Sikap ini selalu hadir di tiap referendum. Di beberapa wilayah, referendum bahkan masih menjadi proses demokrasi yang tergolong sulit untuk diwujudkan.

Politik Penyeragaman Identitas di Spanyol

Bagi para pendukung kemerdekaan, perjuangan di Catalunya telah berlangsung sejak 1714, pada saat Raja Spanyol Philip V menguasai Barcelona. Sejak saat itu, nasionalisme Catalan bangkit secara konsisten untuk meraih otonomi. Pada 1932, pemimpin Catalunya mendeklarasikan berdirinya Republik Catalan dan Pemerintah Spanyol pun menyetujui undang-undang otonomi tersebut.

Gerakan kemerdekaan Catalunya secara masif dimulai sejak diktator fasis Francisco Franco berkuasa pada 1939 di Spanyol. Di bawah pimpinan Jendral Franco yang otoriter, Pemerintah Spanyol melarang penggunaan bahasa Catalunya dan semua institusi pemerintah setempat dihapus untuk mengakhiri regionalisme di Spanyol. Franco secara sistematis menekan semua upaya dan gerakan nasionalisme Catalan. Di bawah kediktatorannya, sejumlah media saat itu menilai "Pemerintah Spanyol berupaya membasmi seluruh institusi, bahasa, hingga mengeksekusi ribuan warga Catalan sebagai bentuk pemusnahan".

Setelah pemerintahan Franco berakhir pada 1975, keadaan secara perlahan mulai berubah. Pada tahun 2006 Pemerintah Spanyol mengembalikan status Catalunya sebagai wilayah otonom di Spanyol dengan status otonomi khusus dan kewenangan mengatur pajak sendiri. Namun tidak lama Mahkamah Konstitusi mencabut keputusan ini pada 2010, dengan alasan selama Catalan termasuk "warga negara" Spanyol, Catalunya tidak dapat disebut sebagai bangsa atau negara.

Di lain sisi, meskipun mendapat kewenangan paling luas dalam mengontrol keuangan daerah jika dibandingkan wilayah Spanyol lain, hak istimewa ini masih dinilai belum cukup bagi warga Catalunya. Selain itu, sebagian besar warga Catalan juga tumbuh dengan rasa nasionalisme yang menganggap diri mereka bukan orang Spanyol. Perubahan status menjadi wilayah otonom ini secara perlahan membangkitkan kembali semangat Catalunya untuk memerdekakan diri dari Pemerintah Spanyol.

Upaya masyarakat Catalunya memerdekakan diri dimulai tahun 2010 ketika diketahui sekitar 25% masyarakat Catalunya menyatakan keinginannya untuk merdeka dari Spanyol. Prosentase keinginan merdeka terus meningkat ketika pada tahun 2011 lembaga survei Pusat Studi Opini Catalunya mengungkapkan bahwa lebih dari 30% masyarakat Catalunya mendukung kemerdekaan. Jumlah ini meningkat tajam menjadi 57% pada 2012.

Melihat terus meningkatnya suara pro-kemerdekaan tiap tahunnya, upaya lebih serius pun dilakukan masyarakat Catalunya pada tahun 2014. Sebuah referendum informal dilaksanakan pada bulan November. Hasilnya menunjukkan sekitar 2,25 juta dari total 5,4 juta warga Catalunya memilih merdeka. Pada 2017, wacana referendum kembali muncul dan didukung 41,% warga Catalunya berdasarkan jajak pendapat Juli lalu.

Kebiasaan penyeragaman dari banyak aspek membuat wilayah-wilayah otonom seperti Basque dan Catalunya menuntut merdeka. Salah satu yang paling krusial adalah peniadaan batas internal negara antar-masing-masing wilayah. Bahasa Kastilia menjadi bahasa resmi pemerintah pusat, menggantikan bahasa-bahasa lain seperti Bahasa Latin atau Bahasa Catalan. Regionalitas menjadi musuh yang ingin diperangi raja. Kebijakan penyeragaman ia tuangkan dalam "Keputusan Nueva Planta".

Kebijakan penyeragaman dilawan oleh sejumlah elit lokal yang memiliki kesadaran nasionalisme lokal. Dasar perlawanan mereka adalah atribut-atribut tradisional, historis, linguistik, maupun budaya yang khas dan patut untuk dipertahankan. Rakyat Catalan adalah salah satu "pemberontak" yang paling tangguh dan hal itu berlangsung hingga kini, mulai dari urusan politik, kultural, hingga sepakbola.

Sejarah mencatat ada sejumlah pemberontakan fisik akibat kerasnya sikap Raja Philip V, dan rata-rata berhasil ditumpas kerajaan Spanyol. Sentimen nasionalisme lokal kemudian makin besar di abad ke-19, bertepatan dengan melemahnya kekuasaan Kerajaan Spanyol, lalu diikuti dengan penghapusan hak istimewa, pelanjutan tradisi dagang antarkawasan, dan pembangunan basis-basis industri skala lokal. Politik penyeragaman oleh Raja Philip ke V dilanjutkan oleh Jenderal Franco. Ia menetapkan bahasa Spanyol sebagai satu-satunya bahasa resmi dan mempersekusi semua bahasa serta identitas historis lokal yang tersisa.

Penutup

Tuntutan kemerdekaan oleh rakyat Catalunya bukanlah sesuatu yang baru tetapi sudah berlangsung ratusan tahun. Penyebabnya adalah strategi Raja Philip V yang ingin mempertahankan kekuasaannya dengan melenyapkan keberagaman identitas wilayah otonom. Upaya ini dilawan dengan melakukan referendum untuk mengetahui pendapat rakyat tentang status masa depannya.

Bagi Indonesia, dan negara-negara merdeka lainnya, apa yang terjadi di Catalunya dapat menjadi cermin dari kesalahan tata kelola pemerintahan. Bagi Indonesia, dampak dari referendum di Catalunya lebih pada sisi politik yaitu bangkitnya keinginan provinsi untuk melakukan referendum. Referendum Catalunya memiliki potensi untuk mempengaruhi politik dalam negeri Indonesia yaitu jika Catalunya lepas dari Spanyol maka gagasan “*right to national self-determination*” atau hak penentuan nasib sendiri yang dikampanyekan politisi Catalunya dapat menginspirasi beberapa pemimpin rakyat Indonesia untuk berbuat hal yang sama.

Pemerintahan Joko Widodo harus melakukan reorientasi pembangunan ke daerah. Jika daerah tidak diperhatikan dan dibangun, bukan tidak mungkin akan muncul gerakan politik untuk merdeka. Hal yang rawan terjadi terutama di daerah yang telah lama menjalankan Pemerintahan Otonomi Khusus yakni Aceh, Papua Barat, dan Papua. DPR-RI dapat menjembatani kepentingan pemerintah nasional dan daerah melalui pembentukan Tim Pengawasan Otonomi Khusus.

Referensi

- Aksi Persatuan Spanyol Digelar, *Kompas*, 10 Oktober 2017, hlm. 14.
- Bayangan Suram Krisis Catalonia, *Kompas*, 7 Oktober 2017, hlm. 8.
- Catalonia Ajak Madrid Berunding, *Media Indonesia*, 17 Oktober 2017, hlm. 14.
- Catalonia Membangkang, *Kompas*, 24 Oktober 2017, hlm. 14.
- Catalonia Siap Merdeka, *Kompas*, 3 Oktober 2017, hlm. 9.
- Catalonia Terseret Ketidakpastian, *Media Indonesia*, 12 Oktober 2017, hlm. 5.
- Catalonia Tetap Mau Merdeka, *Kompas*, 10 Oktober 2017, hlm. 8.
- Krisis Spanyol Memanas, *Kompas*, 5 Oktober 2017, hlm. 9.
- Langkah maju Referendum Catalonia, *Media Indonesia*, 1 Oktober 2017, hlm. 2.
- Leader Warned Ahead of Independence Proclamation, *The Jakarta Post*, 11 Oktober 2017, hlm. 12.
- Madrid Moves toward Direct Rule over Catalonia, *The Jakarta Post*, 17 Oktober 2017, hlm. 12.
- Madrid Ultimatum Catalonia, *Kompas*, 12 Oktober 2017, hlm. 15.
- Momen Genting Bagi Catalonia, *Kompas*, 11 Oktober 2017, hlm. 9.
- Rajoy Ancam Cabut Otonomi Catalonia, *Kompas*, 9 Oktober 2017, hlm. 9.
- Rajoy Tolak Dialog dengan Catalonia, *Kompas*, 6 Oktober 2017, hlm. 8.
- Referendum Catalonia Pengaruhi Wilayah Balkan, *Media Indonesia*, 11 Oktober 2017, hlm. 14.
- Spanyol Kukuh Tolak Kemerdekaan Catalonia, *Kompas*, 3 Oktober 2017, hlm. 14.